

**PERJUANGAN MASYARAKAT DUMAI SEBAGAI KOTA
ADMINISTRATIF MENUJU KOTA MADYA DI ERA REFORMASI
TAHUN 1998-1999**

Disusun Oleh :

Syukrizal

Kamaruddin

Marwoto Saiman

Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Riau

Jl. Bina Widya Km.12,5 Pekanbaru

Email: Syukrizal_rz@yahoo.com

ABSTRACT

This study was conducted with a background in public when rushing efouria reform blasphemy against a regime under Soeharto's rule, Dumai stretching its potential to be a stand-alone autonomous regions namely improving the status of a city that before his Associate Administrative City of Dumai is Bengkalis. This study aims to determine how the background of people's aspirations and how the struggle of the people in the fight for improving the status of Dumai into autonomous regions.

In the writing of this paper the author uses historical and documentary methods with qualitative methods of data analysis in the form of descriptions that are supported by data and facts. Sources of data obtained from informants who participate directly as well as documents and historical heritage.

The results showed that people struggle Dumai done directly on the initiative of the community through the Community Reform Committee Dumai (KRMD) in 1998 to 1999. Carried in the struggle ranging from local governments to aspire to the central government in Jakarta, and eventually resulted in the formation of the Municipality of Dumai and ratified by Law No. 16 Year 1999.

Keywords: Community Struggle, Dumai.

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang dilancarkan oleh masyarakat Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa maka banyak memberikan dampak yang buruk bagi nasib bangsa Indonesia di berbagai bidang sistem politik yakni menuntut adanya demokrasi tercermin pada pemilihan umum yang demokratis, ABRI yang sebelumnya masuk dalam ranah politik pada era reformasi ini tidak boleh lagi berada dalam lingkaran politik, serta muncul berbagai gerakan separatis oleh para fundamentalis seperti gerakan agama. Sistem politik dikembangkan kearah sistem “*Birokratik Otoritarian*” dan suatu sistem “*Korporatik*” (Nasikun,1998:5). Sistem tersebut ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara.

Ketika kesibukan publik dalam efouria reformasi penghujatan terhadap sebuah rezim dibawah pemerintahan Soeharto, Dumai menggeliatkan potensinya untuk menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri yakni meningkatkan statusnya menjadi kota Madya yang sebelum nya Dumai merupakan Kota Administratif dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11 April 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Dumai.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hak hak asal-usul dalam daerah yang bersifat Istimewa.” (UUD 1945 pasal 18)

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Deddy Supriady Bratakusumah , Dadang Solihin,2001:1)

Perjuangan masyarakat dimulai dengan pembentukan Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD) dengan dikeluarkannya keputusan No KPTS 541/XI/1998 tertanggal 26 November oleh Gubernur Riau Saleh Djasit, dan Kota administratif Dumai sah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Didalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode historis dan dokumenter, yang dapat digunakan dalam pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan sejarah perjuangan masyarakat Dumai untuk menjadi daerah otonom Tingkat II Kota Madya Dumai.

“Sebuah metode dapat disebut histories atau dokumenter bila penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber dokumen”.(**Winarno Surachman dalam Yeni Desmaliza,2010:27**).

Didalam bukunya Nugroho Noto Susanto memaparkan terdapat empat tahapan proses metode sejarah yakni :

1. **Heuristik**, adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber.
2. **Kritik**, yaitu pengujian sumber yang ditemukan yang bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta. Ada dua macam kritik yakni kritik ektern dan kritik intern.
3. **Interpretasi**, yakni tahap penafsiran
4. **Historiografi**, yaitu penulisan sejarah (berasal dari *graphein* dalam bahasa Yunani) (**Nugroho Noto Susanto,1984:11-12**)

B. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data penelitian terdapat data primer dan data sekunder. “sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata”(**Dudung Abdurahman,2007:65**). Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan langkah sebagai berikut :

1. Teknik Studi Pustaka

Perpustakaan adalah tempat penyimpanan dan bacaan buku-buku usaha mendapatkan keterangan mengenai subjek sejarah juga keterangan mengenai pengarang. (**Hugiono,1992:30**)

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. (**Jujun. S. Suria Sumantri,1969:192**)

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (**Hadari Nawawi, 1991:133**). Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data melalui arsip-arsip yang berupa surat menyurat, undang-undang, foto-foto, dan yang lain sebagainya.

C. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan maka data tersebut diklarifikasikan berdasarkan fakta dan pendapat dari hasil penelitian. Kemudian data tersebut disusun dan diuraikan dalam pembahasan sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

Didalam menganalisis data terdapat metode-metode sejarah yang mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilihan subjek untuk diselidiki
2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subyek tersebut
3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejadi tidaknya
4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber

(**Louis Gottschalk,1986:34**)

Setelah melalui tahap-tahap didalam analisis data tersebut maka didapatkan lah data-data yang merupakan sumber penelitian, sehingga dapat diungkapkan segala peristiwa sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan data dan fakta secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Munculnya Aspirasi Masyarakat Untuk Menjadi Kota Madya Dumai

1. Pembentukan Persiapan Kota Madya Yang Pernah Gagal

Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai sudah mulai di perjuangkan pada saat Dumai berstatus sebagai kecamatan dari kabupaten bengkalis yakni pada dekade era 60-an.

dalam persiapannya untuk memisahkan diri dari kabupaten induk ini maka pada tanggal 5 Maret 1966 dilaksanakanlah Deklarasi yang dikenal dengan istilah Proklamasi Persiapan Kota Madya Dati II Dumai, **“Dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh Drs. Parlaungan Hasibuan yang menjabat sebagai BPH Riau” (Nahar Effendy, 2007:3).**

namun langkah Dumai untuk menjadi Kota yang Mandiri tersandung, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor :

1. Keinginan Dumai menjadi Kota Madya ini terhenti dikarenakan kabupaten Induk yakni Kabupaten Bengkalis tidak setuju untuk melepaskan Dumai berpisah dari Kabupten Induk
2. Terjadinya masa Transisi atau pergantian pemerintahan daerah Tingkat I Provinsi Riau yakni terpilihnya Arifin Achmad sebagai Gubernur Riau, dimana Gubernur tidak menyetujui Dumai menjadi sebuah wilayah yang terpisah dari Kabupaten Bengkalis dengan alasan Dumai belum siap untuk menjadi daerah Tingkat II Kota Madya (Wawancara: Zulkifli Ahad, 11 Februari 2013)

2. Berdirinya Dumai sebagai Kota Administratif

Pada tanggal 11 April 1979 dibentuklah kota administratif Dumai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 dengan menimbang terdapatnya perkembangan dan kemajuan pada wilayah kecamatan dumai khususnya, maka diaturlah penyelenggaraan pemerintah secara khusus guna menjamin pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat wilayah kecamatan Dumai.

“Pada dasarnya sebuah Kotif hanyalah perpanjangan tangan dari kabupaten induk. Perangkat pemerintahan kotif mulai dari Walikota sampai ke pejabat dibawahnya tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk memerintah kota sebagai sebuah kota mandiri, tidak memiliki APBD sendiri, karena itu tidak dapat membangun kawasan yang menjadi kewenangan Walikota. Walikota tidak lebih hanya memiliki kewenangan Money, dan Material (Nahar Efendy, 2007:5)

Dari pemaparan di atas tampak bahwa dengan dibentuknya Dumai sebagai Kota Administratif tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengatur rumah

tangganya sendiri, Secara struktural tidak ada satu pun dinas berada di bawah kendali Walikota dan kewenangan walikota hanya sebatas lingkup kantor Walikota saja, maka tujuan pembangunan tidak dapat dilaksanakan atas inisiatif dari kotif sendiri melainkan harus menunggu kebijakan dari Kabupaten Induk.

Walikota Administratif Dumai yang pernah menjabat :

1. **Drs. H. Wan Dahlan Ibrahim (1979-1983)**
2. **Drs. H. Rusli Idar (1983-1985)**
3. **H. Fadlah Sulaiman, SH (1985-1990)**
4. **Drs. H. Azwin Yakub (1990-1994)**
5. **Drs. Zainuddin Abdullah (1994-1999). (Katalog BPS Kota Dumai, 2000:13)**

3. Tercetusnya Inisiatif dari Tokoh Pemuda dan Masyarakat

Perjuangan yang dilakukan Masyarakat Dumai menuju Kota Madya ini tidak terlepas dari peran yang sangat strategis oleh para tokoh Pemuda asli Daerah yang memiliki azam dan tekad yang kuat. “Kami selaku kaum Intelektual dan Pemuda memiliki azam dan tekad bahwasanya Dumai harus segera diperjuangkan untuk di tingkatkan statusnya menjadi Kota Madya“ (Wawancara: Ahmad Maritulus, 18 Februari 2013).

Munculnya inisiatif dari tokoh pemuda dan masyarakat ini melihat bahwasanya lambatnya pembangunan yang dilakukan jika Dumai hanya dijadikan sebagai perpanjangan tangan saja dari kabupaten induk, hal ini diungkapkan oleh Ir. M. Hasbi yang merupakan salah satu tokoh yang ikut berjuang. Yang dijadikan landasan utama adalah sebagai berikut :

1. **Selama 20 Tahun menjadi kota administratif, Dumai telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini terlihat dari tumbuhnya berbagai Industri yang berdiri di Kotif Dumai, seperti PT. Wilmar International Group, PT. Chevron, Pelindo, Pertamina.**
2. **Terhambatnya pembangunan daerah, dalam hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh segenap aparatur pemerintahan Kota Administratif. Segala sesuatunya harus menunggu kebijakan dari kabupaten Induk Bengkalis**
3. **Pemerataan Keadilan dalam hal kebijakan yang di berikan tidak seimbang, Kotif Dumai termasuk penyumbang Pendapatan devisa daerah yang besar, namun yang di dapatkan tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Wawancara : M. Hasbi, 12 Februari 2013)**

B. Perjuangan Masyarakat Menuju Kota Madya

1. Terbentuknya Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD)

Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD) di bentuk guna untuk melakukan gerakan-gerakan sebagai motor perjuangan persiapan peningkatan Kotif Dumai menjadi Kodya.

“Awalnya kami melakukan perundingan di kedai kopi Cina Athau yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim pada bulan Maret 1998, yang hadir

bersama pada saat itu antara lain Ir. M. Hasbi dan Ahmad Maritulus, beliau mengatakan sudah saat nya kita yang turun langsung bersama organisasi masyarakat dan meminta agar segera di bentuk panitia kecil“ (Wawancara: Zulkifli Ahad, 11 Februari 2013)

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas maka untuk selanjutnya melalui tekad yang bulat tokoh pemuda ini mencoba mencari bentuk apa yang cocok organisasi persiapan ini, ada yang mengusulkan berbentuk Forum, Badan dan lain-lain. Maka dalam koordinasi tersebut di sepakatilah organisasi ini berbentuk Komite dengan alasan bahwasanya hal ini erat hubungannya dengan Reformasi dan disinilah lahir yang namanya Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD). “Dengan nama Komite tersebut artinya kita tidak memandang Suku,Ras,Agama maupun Budaya yang nafasnya bagaimana Dumai secepatnya ditingkatkan manjadi Kota Madya” (Wawancara: Zulkifli Ahad, 11 Februari 2013)

Maka pada Juli 1998 terbentuklah kepengurusan Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD) yang struktur kepengurusannya berjumlah 38 Orang yang terdiri dari berbagai utusan organisasi dan tokoh masyarakat.

2. Gerakan Awal Masyarakat Meraih Dukungan

Setelah terbentuknya Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD) pada bulan Juli 1998 tersebut, maka pada Tanggal 8 Oktober 1998 gerakan awal yang dilakukan oleh KRMD adalah menyurati Ketua DPR/MPR RI. Berdasarkan surat nomor 013/KRMD/X/1998 yang merupakan pernyataan sikap tentang Peningkatan Status Kota Administratif Dumai menjadi Kota Madya Dati II Dumai yang di tandatangi oleh Koordinator KRMD Drs. H. Umar Umayah, B.Sc, namun hal tersebut masih belum mendapat konfirmasi apapun.

Setelah sekembalinya dari Musyawarah Nasional AMPI, pada tanggal 29 Oktober 1998 segenap Komite Reformasi Masyarakat Dumai langsung bergegas menuju ke Kabupaten Induk Daerah Tingkat II Bengkalis untuk menghadap kepada Bupati yang merupakan kepala Daerah saat itu Fadlah Sulaiman, SH. Pada kesempatan ini masyarakat menyampaikan aspirasinya bahwa ingin melakukan perjuangan untuk meningkatkan status Kotif Dumai menjadi Kodya Dumai.

Dari pertemuan tersebut tanggapan yang diberikan oleh Bupati sangat tidak responsif, seakan ragu dan tidak memberikan dukungan sama sekali untuk melepaskan Kotif Dumai dari Kabupaten Bengkalis dengan memberikan rasionalisasi sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil, sehingga nantinya Dumai tidak mampu membiayai pembelanjaan daerah**
- 2. Infrastruktur wilayah sangat minim, hal ini akan berdampak negatif untuk pelaksanaan pemerintah daerah nantinya dan fasilitas-fasilitas lain juga masih sangat minim. (Wawancara : Ahmad Maritulus 18 Februari 2013)**

Dari tanggapan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut memberikan dampak negatif dari keinginan dan cita-cita masyarakat Dumai.

3. KRMD Berjuang ke Pemerintah Pusat Jakarta

Kurangnya respon yang di tampilkan oleh Kabupaten Induk Bengkalis untuk memberikan persetujuan melepaskan Kotif Dumai dari Kabupaten Induknya tidak menyurutkan langkah masyarakat Dumai. Rombongan Komite Reformasi Masyarakat Dumai berangkat ke Jakarta pada tanggal 23 November 1998 pada pukul 09.00 Wib dari Kantor Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) perwakilan Dumai yang terletak di Jalan Sukajadi dibawah pimpinan SW. Simanungkalit, keberangkatan ke Jakarta dengan menggunakan Transportasi darat. Untuk itu dipilihlah bus Antar Lintas Sumatra (ALS) yang di gunakan untuk transportasi menuju Jakarta.

**“Mengingat dana yang terbatas, maka kami berangkat melalui transportasi darat, selama 3 Hari perjalanan yang di tempuh untuk sampai ke tujuan Ibu Kota Negara, berbagai rintangan akan kami hadapi demi tercapainya cita-cita masyarakat Kotif Dumai”
(Wawancara: Zulkifli Ahad, 11 Februari 2013)**

Setelah rombongan Komite Reformasi Masyarakat Dumai sampai di Jakarta, rombongan ini menginap di Mes Riau. Perjuangan yang di lakukan KRMD untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta yakni dengan menemui Menteri Dalam Negeri, DPR RI, dan jika memungkinkan bertemu dengan presiden Habibie. Hal ini di lakukan oleh Komite Reformasi Masyarakat Dumai pada tanggal 27 November 1998, dalam laporan yang di buat oleh KRMD secara jelas kronologis pertemuan tersebut adalah :

- a. **Jum’at 27 November 1998 Jam 07.00 s/d 08.30 Wib Pertemuan dengan Mendagri Syarwan Hamid**
- b. **Jum’at 27 November 1998 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib Pertemuan dengan Dirjen PUOD Prof.Dr.Ryas Rasyid**
- c. **Jum’at 27 November 1998 Jam 13.30 s/d 15.30 Wib Pertemuan dengan Komisi II DPR RI**
- d. **Jum’at 27 November 1998 Jam 17.00 s/d 18.00 Wib Pertemuan Khusus dengan Dirjen PUOD**

Perjuangan yang telah di laksanakan di Jakarta membuahkan hasil-hasil yang memberikan kesempatan serta dukungan penuh untuk meningkatkan status Kotif Dumai menjadi Kodya Dumai. maka Drs. H. Umar Umayah, B.Sc selaku ketua KRMD mengeluarkan surat nomor 37/KRMD/XII/1998 pada tanggal 2 Desember 1998 yang merupakan laporan tentang hasil kunjungan KRMD di Jakarta.

Laporan hasil kunjungan Komite Reformasi Masyarakat Dumai ke Jakarta sebagai berikut :

Hasil-hasil yang di capai

- a. Pertemuan dengan Mendagri
 1. Peningkatan status Kotif Dumai di upayakan sbelum Pemilihan Umum tahun 1999
 2. Peningkatan status Kotif Dumai langsung menjadi Kota Madya Tingkat II (otonom)
- b. Pertemuan dengan Dirjen PUOD

1. Dirjen PUOD beserta jajarannya segera memproses bahan-bahan yang di sampaikan oleh Komite Reformasi Masyarakat Dumai
 2. Minggu pertama atau minggu kedua Desember 1998 Tim dari Depdagri akan turun ke Dumai
 3. Dirjen PUOD langsung memerintahkan Direktur Pengembangan Wilayah/Kota segera menindaklanjuti dan mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut tentang pemrosesan peningkatan status Dumai dan berkoordinasi dengan DPR RI Komisi II
- c. Pertemuan dengan Komisi II DPR-RI
1. Mendukung sepenuhnya Peningkatan Status Kotif Dumai menjadi Kodya Daerah Tingkat II Dumai
 2. Batas waktu terbitnya Undang-undang tentang peningkatan status Kota Madya diupayakan bulan Maret 1999 telah rampung
 3. DPR RI akan mendesak Depdagri agar segera memproses dan mengajukan RUU tersebut ke DPR RI
 4. Untuk mengantisipasi kemungkinan akan terlambatnya pengajuan dari Depdagri maka Komisi II DPR RI mempersiapkan diri dengan Tim Kecil yang terdiri dari :

Dari komisi II RI sebanyak	6 orang
Dari Pemda Tk. I Riau sebanyak	1 orang
Dari Pemda Tk. II Bengkalis sebanyak	1 orang
Dari Pemda Kotif Dumai sebanyak	1 orang
Dari KRMD	1 orang
- Tim juga di bantu oleh staf Sekretariat DPR RI sebanyak 3 orang dan dari KRMD 1 orang
5. Tim kecil yang di bentuk akan mengadakan rapat kerja pada tanggal 7 Desember 1998 di Jakarta
 6. Tugas Tim menyiapkan Draf Undang-Undang tentang peningkatan Usulan inisiatif dari DPR RI seandainya usulan dari pemerintah (Depdagri) DPR RI terlalu lama
 7. Setelah pertemuan tanggal 7 Desember 1998 di Jakarta maka Komisi II DPR RI segera akan turun ke Dumai
- d. Hasil Pertemuan Khusus dengan Dirjen PUOD
1. Dirjen PUOD menegaskan kembali bahwa akan sesegera mungkin menurunkan Tim ke Dumai (minggu Pertama Desember 1998)
 2. Depdagri akan berpacu lebih dahulu dan tak ingin di dahului oleh DPR RI dengan usulan inisiatifnya

C. Dumai Menjadi Kota Madya

1. Keluarnya Surat Keputusan Persetujuan Pemerintah
 - a. Pada tanggal 4 Desember 1998 Bupati Bengkalis H. Fadlah Sulaiman mengeluarkan dua surat sekaligus pada hari yang bersamaan yang di tujukan

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau dan surat yang kedua di tujukan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis Tingkat II. Surat pertama yang bernomor 135/TP/1676 perihal usulan peningkatan status Kotif Dumai Menjadi Kodya Dati II. Surat yang kedua yakni surat yang di tujukan kepada ketua DPRD Tingkat II Bengkalis dengan surat yang bernomor 135/TP/1691, surat ini berisikan tentang permohonan persetujuan untuk melepaskan Dumai dari Kabupaten Bengkalis. Didalam surat itu Bupati Bengkalis H. Fadlah Sulaiman, SH memberikan pertimbangan berupa aspirasi dan tuntutan masyarakat Dumai serta upaya yang dilakukan Pemkab Dati II Bengkalis dalam meningkatkan status Kotif Dumai, dalam hal ini meminta kepada pihak DPRD Kabupaten Bengkalis dapat mengeluarkan persetujuan prinsip atas penyerahan sebahagian wilayah Kabupaten Bengkalis untuk ditetapkan menjadi wilayah Kotamadya Dati II Dumai.

- b. Pada tanggal 16 Desember 1998 keluar keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bengkalis No 08/KPTS/DPRD/1998 tentang persetujuan melepaskan sebagian wilayah kabupaten Bengkalis untuk dimasukkan kedalam wilayah Kotamadya Dati II Dumai, dalam hal ini di tandatangani oleh Ketua DPRD Drs. H. Helmi Maat.
- c. Selanjutnya adalah surat persetujuan dari Gubernur Tingkat I Riau dalam hal ini Gubernur Riau Saleh Djasid mengeluarkan surat yang di tujukan kepada DPRD daerah Tingkat I provinsi Riau pada Desember 1998 bernomor 135/TP/3055 mengenai permohonan rekomendasi untuk peningkatan status Kotif Dumai, surat ini juga merupakan salah satu tanggapan atas surat yang dikirim oleh Bupati Daerah Tingkat II Bengkalis. Dari surat yang di layangkan tersebut merupakan pertimbangan untuk mengembangkan wilayah yang berada di provinsi Riau.

“Pertimbangan yang dibuat Gubri antara lain dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di provinsi Riau, pemprov bermaksud untuk terus berupaya mengembangkan beberapa wilayah dalam bentuk peningkatan status berdasarkan ketentuan berlaku” (Nahar Effendy, 2007:25)

- d. Berdasarkan surat Permohonan Rekomendasi dari Gubernur Riau kepada DPRD Tingkat I Provinsi Riau di tanggapi dalam tempo waktu yang relatif singkat, akhirnya DPRD Provinsi Riau menyetujui untuk peningkatan status Kotif Dumai tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 1999 DPRD Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Dati I Riau Nomor: 01/KPTS/DPRD/1999 Tentang Penetapan dan Dukungan Dewan terhadap usul perubahan peningkatan status Kotif Dumai menjadi Kodya Dumai. Keputusan tersebut di tandatangani oleh ketua DPRD Dati I Riau Drs. Darwis Rida Z.

2. Lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 1999

Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai di tetapkan dengan Undang-undang RI No 16 Tahun 1999 yang di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia B.J.

Habibie pada tanggal 20 April 1999. Dalam proses penyusunan Undang-Undang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tersebut di laksanakan di Jakarta, adapun yang ikut serta dari Komite Reformasi Masyarakat Dumai dalam penyusunan UU pembentukan Kodya Dumai adalah Ummar Umayah dan Timo Kipda.

“ Dari masyarakat yang ikut andil dalam pembahasan UU pembentukan Kota Madya Dumai adalah dari KRMD yakni saya dan ketua Koordinator KRMD bapak Umar Umayah, selain itu juga dari unsur pemerintahan Kotif Dumai, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Yang dibahas secara bersama DPR RI ” (Timo Kipda)

Dengan lahirnya Undang-undang No 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai tersebut secara pasti Dumai telah sah menjadi Kota Madya Dati II Dumai. Pada hari selasa 27 April 1999 dilaksanakan acara peresmian Kota Madya Dati II Dumai beserta pelantikan Walikota Madya Dumai di Jakarta, selain Dumai ada 11 Kabupaten dan Kotamadya beserta pejabat Bupati dan Walikota yang juga diresmikan pada hari yang sama.

Dari 11 Kabupaten/Kota yang diresmikan dan dilantik tersebut di atas, yang menjabat sebagai Walikota Madya Dumai yang pertama dilantiklah Drs. H Zaharuddin Abdullah oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 13.24-376 tertanggal 26 April 1999.

Dengan diresmikannya Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai dengan Undang-undang No 16 Tahun 1999 tersebut, maka resmilah status kota Administratif Dumai menjadi Kota Madya yang berdiri sendiri, dan dinobatkan pada tanggal 27 April 1999 sebagai hari lahirnya Kota Dumai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kota Dumai adalah ibu kota Kota Dumai yang merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Kota Dumai memiliki kawasan yang potensial dan strategis yang terletak di pesisir pantai laut yang berhadapan dengan selat Malaka.

Ketika kesibukan publik dalam era reformasi penghujatan terhadap sebuah rezim dibawah pemerintahan Soeharto, Dumai menggeliatkan potensinya untuk menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri yakni meningkatkan statusnya menjadi kota Madya yang sebelumnya Dumai merupakan Kota Administratif dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11 April 1979 tentang pembentukan Kota Administratif Dumai.

Latar belakang munculnya aspirasi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yakni :

1. Pembentukan Persiapan Kota Madya Yang Pernah Gagal
2. Berdirinya Dumai sebagai Kota Administratif selama 20 Tahun lamanya
3. Tercetusnya inisiatif dari tokoh pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan status kota administratif Dumai menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai

Dari latar belakang tersebut maka memunculkan gerakan-gerakan untuk memperjuangkan daerah menjadi Kota yang mandiri, hal ini diawali dengan dibentuknya Komite Reformasi Masyarakat Dumai (KRMD) yang dibentuk pada bulan Juli 1998. Melalui Komite yang dibentuk inilah perjuangan menuntut aspirasi yang dilancarkan masyarakat dengan usaha-usaha yang akan dilakukan.

Setelah dibentuknya Komite Reformasi Masyarakat Dumai tersebut, maka usaha awal yang dilakukan adalah dengan membuat pernyataan sikap dengan tuntutan peningkatan status Kotaadministratif Dumai, namun hal tersebut belum mendapatkan respon yang positif terutama dari Kabupaten Induk Bengkalis. Hal ini tidak menyurutkan langkah perjuangan masyarakat Dumai, sehingga pada tanggal 23 November 1998 Rombongan Komite Reformasi Masyarakat Dumai berangkat ke Jakarta sekitar pukul 09.00 Wib. Hal ini dilakukan guna menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menuntut langsung kepada pemerintah pusat. Kronologis kegiatan yang dilakukan oleh KRMD di Jakarta adalah :

- a. **Jum'at 27 November 1998 Jam 07.00 s/d 08.30 Wib Pertemuan dengan Mendagri Syarwan Hamid**
- b. **Jum'at 27 November 1998 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib Pertemuan dengan Dirjen PUOD Prof.Dr.Ryas Rasyid**
- c. **Jum'at 27 November 1998 Jam 13.30 s/d 15.30 Wib Pertemuan dengan Komisi II DPR RI**
- d. **Jum'at 27 November 1998 Jam 17.00 s/d 18.00 Wib Pertemuan Khusus dengan Dirjen PUOD**

Dari hasil pertemuan tersebut maka pada tanggal 2 Desember 1998 Drs. H. Umar Umayah, B.Sc selaku ketua KRMD mengeluarkan surat nomor

37/KRMD/XII/1998 yang merupakan laporan tentang hasil kunjungan KRMD di Jakarta yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pasca kronologis tersebut barulah lahir surat dukungan serta keputusan restu dari pemerintah daerah untuk menyetujui pelepasan Kota Dumai dari Kabupaten Induk. Keputusan tersebut merupakan syarat utama yang harus di penuhi dalam rangka pemekaran daerah.

Sehingga dengan rentang waktu yang tidak terlalu panjang terealisasi lah Kotaadministratif Dumai menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai. Pada 27 April diresmikannya Kota Madya Dumai di Jakarta bersama 11 Kabupaten Kota lainnya yang ada di Indonesia, yang menjadi walikota pertama pada waktu itu adalah Drs. H. Zainuddin Abdullah. Dan pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai.

Peran pemuda dalam pembangunan dan memajukan daerah sangat memberikan dampak yang positif, dari sekian banyak Sumber Daya Alam yang dimiliki sebagai potensi yang menunjang pembangunan daerah sangat di perlukan Sumber Daya Manusia yang baik. Hal tersebut hendaknya dijadikan sebagai perhatian khusus oleh pemerintah daerah untuk lebih serius meningkatkan dan menggali potensi-potensi yang ada pada negeri ini.

Sejarah telah membuktikan peran-peran pemuda yang memiliki ghiroh semangat perjuangan menjadikan bangsanya sebagai bangsa yang maju dan sejahtera, menjadinya Kota Dumai yang maju kini adalah merupakan hasil-hasil dari perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, semoga hal tersebut dapat kita kenang dan akan dijadikan sebagai contoh pelajaran yang positif untuk generasi-generasi yang akan datang. “Sesungguhnya Bangsa yang Besar adalah bangsa yang menghargai Jasa Para Pahlawannya” (Soekarno), “ Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Abdurahman, Dudung, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Ar-ruzz Media : Jogjakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2000, *Dumai Dalam Angka 2000*, : Dumai
- Bintarto, 1977, *Pengantar Geografi Kota*, U.P. Spring : Yogyakarta
- Daldjoeni, 1992, *Geografi Baru*, Alumni : Bandung
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai, 2004, *Dumai Tempo Doeloe*, MatriX : Dumai
- Effendi, Nahar, 2007, *Merajut Asa, Menggapai Cita Perjuangan Masyarakat Dumai Menuju Kota Mandiri*, Pemerintah Kota Dumai Dengan LKKMD : Dumai
- Gottschalk, Louis, 1986, *Mengerti Sejarah*, Universitas Indonesia : Jakarta.
- Hari Wibisono, Bambang, *Perencanaan Kota Komprehensif*, Gajah Mada University Press : Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kansil, C.S.T. dan Julianto. 1988. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Kartodirdjo, Sartono, 1992, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, Dari Imperium Sampai Imperium*, Jakarta: PT Gramedia.
- Katalog BPS Kota Dumai, 2000
- Khairullah, Malik Cahyadin, 2006, *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia, Studi Kasus Kabupaten Lahat*, Jurnal Ekonomi pembangunan Vol. 11 No. 3
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga : Jakarta.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius
- NAS, P.J.M, 1979, *Kota Dunia Ketiga*, Bhratara Karya Aksara : Jakarta

- Nasikun, 1998, *Pancasila Dalam Perspektif Reformasi : Konteks Ekonomi Pembentukan Serta Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Pancasila UGM: Yogyakarta
- Nazir, Muhammad, 1989, *Metodologi Penelitian*, Ghali Indonesia: Jakarta
- Notosusanto, Nugroho, 1984, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Inti Idayu Press: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai.
- Sujamto, 1984, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.
- Sujamto, 1993, *Perspektif otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Soemardjan, Selo, 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Susanto Tirtoprojo. 1982. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai.
- Widjaja, A.W, 1998, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta